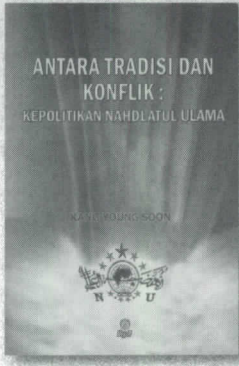


**Judul buku** : *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*  
**Penulis** : Kang Young Soon  
**Penerbit** : Universitas Indonesia (UI -Press) Jakarta  
**Tebal** : 432 +xxx  
**Cet** : 1 (2008)



## Tradisi Pesantren, Khittah dan Panggung Politik NU

Buku yang diuntai oleh Kang Young Soon, perempuan kelahiran Korea Selatan ini, mendeskripsikan tentang perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) dari tahun 1984 hingga tahun 1999. Tahun 1984, dimulai dari satu babak penting yang lahir dari Mukhtamar ke-27 di Situbondo, kembali ke Khittah 1926 dan menerima asas tunggal Pancasila. Khittah 1926 menjadi penegas bahwa NU mencabut diri dari panggung politik praktis dan memilih panggung di luar negara dengan menjadi organisasi sosial keagamaan. Sementara, titik balik terjadi. Seiring angin politik berubah, keinginan untuk masuk ke panggung politik kembali menyeruak. Bahkan di tahun 1999, melalui salah satu kader nahdliyyinya, KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden.

Gambaran besar selama kurun 1984-

1999, yang dideskripsi dari buku yang berawal dari disertasi, berjudul *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* ini setidaknya menarasikan tiga bagian. *Pertama*, soal relasi antara tradisi pesantren dan NU, *kedua* soal khittah 1926, serta *ketiga* konflik dan tarik-menarik NU di panggung politik.

### NU dan Tradisi Pesantren

Kang Young Soon, di bagian-bagian awal buku ini, mengupas tentang tradisi pesantren. Ia melihat, ada relasi antara kiai dan santri dalam sebuah hubungan yang unik dan khas. Balutan ketaatan, kepatuhan dan keterikatan santri kepada kiai, menjadi salah satu ciri tradisi pesantren yang salah satunya dipetik dari kitab *Ta'limul Muta'allim*, yang menjadi rujukan kalangan pesantren.

Selain itu, doktor dari jurusan ilmu

sosial program pasca sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia ini menggambarkan, bahwa selain mengajarkan ilmu keagamaan, kiai juga sangat memperhatikan dan menyayangi para santri, bahkan membantu santri dalam ekonomi. Keterikatan juga masih terbangun, meski santri sudah tidak “mondok” lagi.

Perempuan kelahiran Korea Selatan itu juga menceritakan, bahwa paling tidak, ada lima dasar nilai pesantren, keikhlasan, kesederhanaan, *ukhuwah Islamiyah*, kemandirian, dan perjuangan. Lebih lanjut, ia mengisahkan bahwa hubungan kiai dan santri dikatakan saling membutuhkan. Kiai menularkan ilmu keagamaan terhadap santri, dan santri akan membela kiai dengan segenap tenaga, karena kekuatan agama membuat orang berkorban secara sukarela.

Dalam buku ini juga diceritakan bahwa “kekuasaan” kiai tidak hanya sebatas kepada santri. Di luar lingkup pesantren pun, kharisma kiai juga bisa dirasakan. Kharisma ini terjadi karena kiai memiliki wewenang mutlak. Wewenang mutlak itu diperolehnya karena faktor integritas keagamaan dan moralnya, sehingga kiai mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara lintas batas.

Young Soon menggambarkan bahwa kharisma kiai pada awalnya lahir dari suatu proses sosial yang terjadi di lingkungan pesantren. Dukungan kemampuan ekonomi, ide (ilmu agama), dan status dalam masyarakat, membuat tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Dalam beberapa hal, kiai dengan kharismanya juga dianggap memiliki kekuatan lebih. Dalam menghadapi krisis misalnya, kalangan NU dan sejumlah kiai sepuh memandang situasi negara secara rohani. Pada tahun baru 1996, demikian digambarkan Young Soon, kiai sepuh menganjurkan kepada warga NU di Jawa Timur untuk melakukan *istighasah*. Tujuan dari *istighasah* adalah, supaya pertama, mawas diri, kedua memperkuat iman serta tawakkal dalam menghadapi cobaan, dan ketiga permohonan pertolongan kepada Allah SWT agar agamanya diselamatkan dari fitnah oleh tangan penguasa dzalim. Karena itulah, kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*), sebagaimana dikutip Young Soon dari Dhofier, dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Maka, tidak seorangpun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai dalam lingkungan pesantrennya kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya.

Kharisma kiai juga terletak pada keyakinan para pengikutnya bahwa kiai mempunyai sifat transendental, sehingga kiai menjadi teladan sempurna bagi semesta dan merupakan contoh hidup tentang makrifat, mengajarkan tashawuf dan bagaimana cara mencapai derajat tertinggi yang didambakan para muslim.

Bangunan tumpukan –meminjam istilah Bordieu—modal simbolik yang berlipat dari kiai ini tak lepas dari pengaruh tradisi Jawa. Mengutip Yahya Muhaimin, Young Soon menunjukkan bahwa dalam tradisinya, masyarakat Jawa

memiliki perilaku rasa segan (sungkan). Perilaku ini adalah perpaduan dari rasa malu dan hormat kepada atasan. Mereka menghindarkan diri untuk bertingkah laku yang melibatkan emosi secara berlebihan, dan memusatkan diri pada aspek kebatinan.

Oleh Yahya juga dijelaskan bahwa tradisi masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi ketenangan sikap yang merupakan refleksi tingkah laku yang halus dan sopan, pengendalian diri, dan pengekanan diri. Kewibawaan juga akan tercapai dengan sikap tenang di muka umum. Orang yang berwibawa adalah orang yang memiliki status tertentu sehingga menjadi sumber kekuasaan. Sedangkan kekayaan, ilmu pengetahuan dan jabatan merupakan sumber status, sepanjang kekuasaan itu dirasakan juga oleh orang lain.

Dengan sikap ini, akan timbul sikap kesetiaan dan ketaatan yang datang secara otomatis dari mereka yang berada di sekelilingnya, sehingga terbentuk watak ketergantungan yang kuat pada atasan serta ketaatan yang berlebihan pada kekuasaan.

Tipologi masyarakat Jawa inilah yang tampaknya membentuk tradisi pesantren. Ia, mempunyai kaitan erat dengan budaya masyarakat, sehingga bisa menjadi basis mobilisasi lewat kekuatan emosi dan perilaku, yang terfokus pada norma dan nilai. Ia bisa menjadi agen mobilisasi dan organisasi, yang memiliki kaitan sangat erat, terutama tradisi dan organisasi agama yang berperan penting sebagai basis untuk mengorganisasikan

masyarakat agama untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Dengan memahami nilai dan tradisi ini, kita jadi tahu bahwa untuk memahami orientasi, sikap dan tingkah laku politik dalam suatu masyarakat, nilai dan tradisi menjadi faktor penting dalam pembentukan budaya politik yang kemudian direfleksikan dalam sikap dan tingkah laku politik warganya.

Untuk itulah kenapa kiai yang menjadi inti dari NU, kemudian memiliki peran dan posisi dominan. Setidaknya ada dua faktor kenapa NU menjadi dominan. *Pertama*, sebagai organisasi keagamaan NU harus memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu dan etika keagamaannya. *Kedua*, seorang kiai yang paling kecil levelnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri dan pengikutnya.

Kewibawaan dan pengaruh yang membudaya itulah di dalam organisasi NU dikongkretkan secara formal organisatoris dalam kepemimpinan lembaga syuriah. Dari sini bisa dilihat, NU terdiri dari (*jam'iyah*) organisasi struktural dan jama'ah (kelompok kultural).

Selain itu, untuk mempertahankan kelasnya, terkadang memunculkan apa yang disebut oleh Zamakhsyari sebagai jaringan pesantren. Kiai mempertahankan tradisi dengan antara lain, melalui transmisi ilmu; hubungan saling memasok santri di antara pesantren tertentu, ataupun jaringan kekerabatan antarkiai yang muncul melalui perkawinan

*endogamous.*

Budaya pesantren ini pula yang mempengaruhi NU bertingkah laku dalam politik. Karena, mengkaji masalah tradisi NU adalah mengkaji tradisi pesantren, dan pesantren adalah basis tradisi NU. Tradisi pesantren menjadi sangat erat dengan organisasi keagamaan NU karena pesantren merupakan basis struktur sosial agama Islam dan NU yang dibentuk melalui relasi antar guru dengan murid. Young Soon menunjukkan bahwa tradisi NU (pola hubungan kiai-santri) benar-benar nyata dan berpengaruh langsung terhadap kepolitikan NU karena NU sebagai organisasi yang besar selalu bersentuhan dengan negara.

Temuan Young Soon menunjukkan bahwa tradisi pesantren begitu kuat mempengaruhi perilaku orang-orang NU, misalnya dalam hubungan antara kiai dan santri dalam bentuk paternalisme dan patron-klien. Dan sejak awal sekali pun, NU menunjukkan betapa besarnya peranan para kiai pemimpin pesantren di dalamnya. Hubungan kiai-santri yang dilandasi oleh nilai kepatuhan yang merupakan tradisi pesantren, sebagai syarat esensial kepemimpinan organisasi dan juga inti mobilisasi dalam berbagai kegiatan.

Maka, pola dari narasi itu, bukan hanya peristiwa dan kegiatan politik dianggap sebagai integral dalam agama, tetapi juga tindakan politiknya baik yang kompromistis maupun radikal terhadap pemerintah, selalu dicarikan referensinya pada nilai-nilai agama sebagai legitimasi atas keputusan-keputusan politik

yang diambil. Kiai sendiri, dianggap memiliki kewibawaan dan pengaruh yang lebih tinggi dari pada politisi profesional karena hubungan tradisi pesantren dengan NU dimulai dari hubungan guru dengan murid.

### **Politik NU Pasca Khittah**

Dalam sejarahnya, semula NU bergerak secara kultural dengan melakukan dakwah di pedesaan. Apa yang dilakukan oleh NU, semakin mendapatkan penguatan karena, penguasa tradisional (pribumi) telah menjadi alat kekuasaan Belanda. Selain itu, NU sendiri secara bertahap mampu menggalang berbagai kekuatan masyarakat di pedesaan secara efektif guna membendung apa yang disebut kekuatan formalistis di kota yang mengancam eksistensi semangat keagamaan tradisional.

Tetapi, dalam perjalanannya, NU terus-menerus berubah seiring keinginan elitnya. Di tahun 1940, misalnya, NU pernah bergabung dengan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Ini, di satu sisi menurut Young Soon menjadi momentum penting, karena NU memasuki kancah politik yang lebih riil meski ia adalah organisasi keagamaan. Begitu pula di waktu yang lain pernah keluar masuk di Masyumi dan PPP.

Selain soal politik, sebenarnya sering diperebutkan adalah tafsir atas khittah yang sayangnya tak menjadi bagian khusus meski di dalamnya uraian tentang khittah 1926 tersebar banyak bagian.

Young Soon sendiri melalui wawancara dengan KH Ma'shum, menunjukkan

bahwa tujuan kembali ke khittah, salah satunya adalah untuk menghindari kebencian rezim Soeharto kepada NU. Sementara, salah satu sekretaris tim tujuh perumus materi khittah dari kelompok Situbondo, Said Budairy, mengatakan ada dua alasan kenapa NU kembali ke khittah. *Pertama*, ingin mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang kultural dan *kedua*, mengembalikan supremasi ulama dalam struktur organisasi NU dan bukan supremasi politisi. Ini karena, kecenderungan NU untuk memasuki dunia politik memunculkan citra NU dari organisasi keagamaan menjadi pseudo partai politik yang tidak sejalan dengan khittah.

Dalam catatan yang dibuat Kang Young Soon menyebutkan bahwa Kiai As'ad Syamsul Arifin adalah tokoh kiai sepuh. Pada awal muktamar di Surabaya, tahun 1971, beliau sangat menginginkan NU kembali ke Khittah karena sejak masuk ke kancah politik, telah banyak kemunduran dirasakan NU lantaran menempatkan politik sebagai ujung tombak perjuangan.

Kegiatan seperti pendidikan, sosial-budaya, bahkan di bidang *fund and force*, semua diarahkan untuk menunjang perjuangan politik, sehingga banyak kiai meninggalkan pondoknya, banyak guru beralih profesi menjadi politisi. Maka, pada muktamar di Semarang tahun 1979, rumusan kembali ke khittah telah digelindingkan tetapi belum bisa berjalan karena banyak tokoh politik yang memimpin PPP adalah memegang jabatan penting di NU.

Dengan kembali ke khittah 1926, sebenarnya, NU kembali menjalankan peranannya sebagai organisasi ulama, yang hakekatnya membimbing kehidupan umat. Khittah 1926 juga membuat NU memasuki babak baru karena NU tak lagi “berjuang” melalui wadah politik formal, tetapi melalui transformasi kultural sebagai bagian inheren dari bangsa Indonesia. Dengan kembali ke khittah, tujuannya untuk melakukan transformasi sosial secara lebih kaffah dan mendasar. Dan upaya memperjuangkan aspirasi Islam secara kultural, ini juga sebagai upaya untuk kembali kepada ciri-ciri khas NU.

Young Soon mencatat bahwa sejak dicanangkan kembali ke khittah 1926, NU telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Khittah juga menjadi titik tolak atas terjadinya perubahan, di satu sisi, ia telah meninggalkan beban politik yang sebelumnya senantiasa memberati NU, dan di sisi lain, memberikan nuansa pluralitas dan keterbukaan, baik dalam keilmuan agama maupun pandangan-pandangan dari luar sebagai kekayaan budaya NU.

Meski memiliki segenap keuntungan karena tak lagi berkiprah di politik formal, tarik-menarik soal tafsir khittah terus-menerus terjadi. Kembali ke Khittah 1926, ternyata menimbulkan polarisasi di dalam NU. Hal ini tidak dapat dielakkan mengingat peran dan pengaruh elit ulama NU yang sangat menonjol. Ia, dapat dengan mudah mengarahkan setiap kebijakan NU sesuai dengan kepentingannya.

Godaan lain juga disampaikan Karcung Maridjan, yaitu adanya sebagian warga NU yang berkeinginan untuk memunculkan khittah plus. Pada sebuah seminar di Yogyakarta di tahun 1993, Maridjan mengatakan bahwa setengah usia NU untuk politik, karena itu wajar bila *impuls* berpolitik tak pernah mati di lingkungan NU. Artinya, warga NU belum benar-benar dapat menerima khittah, karena khittah menjadi objek strategis untuk memperjuangkan kepentingan para elit NU yang saling bersaing di dunia nyata.

Setelah NU kembali ke khittah 1926, NU menjadi ajang rebutan pengaruh kekuasaan baik partai politik maupun pemerintah. Di NU sendiri, yang penuh dengan tradisi kepatuhan dan keterikatan antara santri dan kiai tak lepas dari konflik. Konflik internal NU terkait dengan konflik kiai, karena kiai adalah aktor dan elit NU. Selain itu, menghubungkan kiai dan konflik, selalu berhubungan dengan fanatisme pengikutnya. Konflik antara kiai secara otomatis akan diikuti oleh para santrinya, karena mereka memiliki loyalitas yang kuat (paternalisme dan fanatisme).

Selain soal khittah, sebagai lembaga besar, NU juga lekat dengan konflik. Perselisihan antara Gus Dur dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, misalnya. Karena adanya ketaksepahaman ini, para kiai sampai harus mengadakan pertemuan khusus di pondok pesantren Darul at-Taubid, Arjawinangun, Cirebon. Sekitar 200 orang kiai hadir. Yang dalam pertemuan itu, para kiai menggugat Gus

Dur. Dalam pertemuan yang digelar Maret 1989 itu, para kiai menilai Gus Dur menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Tapi, pertentangan antara Gus Dur dengan Kiai As'ad tak berhenti di situ. Pada muktamar ke-29 di pondok pesantren al-Munawwir Krapyak, pertentangan antara Gus Dur dengan Kiai As'ad berlanjut. Gus Dur menginginkan dirinya dipilih kembali sebagai pimpinan NU, sementara, Kiai As'ad tidak setuju dengan pencalonan Gus Dur.

Inilah uniknya. Hasil muktamar di Krapyak yang kembali menunjuk Gus Dur memegang tongkat kepemimpinan NU, membuat Kiai As'ad memilih *mufaraqah*. Tetapi, meski *mufaraqah*, Kiai As'ad yang merupakan salah satu kiai sepuh yang mampu memobilisir massa untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan di tubuh NU menerima keputusan muktamar.

Dalam kesimpulannya, Young Soon juga mengatakan, meskipun antara anggota NU terjadi perselisihan, namun mereka tetap bertahan dalam NU, karena kepatuhan yang tinggi terhadap para kiai dan basis dukungannya ada di NU.

Meski begitu, konflik yang terjadi dengan Kiai As'ad, tampaknya berbeda dengan kasus Abu Hasan yang mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru. Abu Hasan yang memiliki dana yang kuat ini, menjelang muktamar ke-29 di Cipasung, melakukan safari ke berbagai daerah sambil memberi bantuan. Setiap ada kesempatan, ia mengajak bicara tokoh di daerah mengenai kelemahan Gus

Dur yang tidak mungkin tampil kembali sebagai ketua umum PBNU. Ia mengatakan bahwa pemerintah sudah tidak mau lagi Gus Dur memimpin. Dengan cara itu Abu Hasan menarik simpati masa. Kita pun tahu bahwa Gus Dur tetap memenangkan pertarungan dengan abu hasan.

Dari sini bisa dilihat bahwa apa yang terjadi di tubuh NU dengan konflik yang disebabkan selain karena perbedaan pandangan, juga perebutan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi.

Young Soon mencatat, bahwa tradisi dan konflik dalam wujud perilaku warga NU, cenderung berperan dalam kepoltikan NU, baik secara internal maupun unsur eksternal. Tetapi, cara-cara penyelesaian khas NU juga muncul. Dalam pencalonan Gus Dur menjadi presiden keempat, misalnya, Gus Dur tetap membutuhkan restu kiai dari berbagai daerah, walaupun Gus Dur adalah seorang kiai NU kharismatis yang sangat berpengaruh.

Yang menarik, dari contoh dua konflik ini, Gus Dur selalu memenangkan perseteruan. Tentang itu, Young Soon menjelaskan bahwa popularitas dan ketokohan Gus Dur dalam tubuh NU saat itu diakui sangat besar sehingga mengalahkan popularitas lawan-lawannya. Ada tiga unsur yang membuat kenapa dukungan pengaruh Gus Dur begitu kuat di NU: ilmu yang tinggi, wawasan yang luas, dan faktor keturunan. Kang Young Soon menegaskan bahwa popularitas Gus Dur yang masih memiliki keturunan darah biru serta cucu dari pendiri NU. Hal lain

dari kekuatan Gus Dur adalah kemampuannya menerima semua kalangan.

Malahan, pada periode kedua kepemimpinannya, Gus Dur cenderung berhadapan dengan kekuasaan negara. Sikap ini tentu membuat negara membatasi gerak-geriknya. Namun, justru karena pembatasan terhadap Gus Dur, dukungan dari basis masa dan tokoh NU yang berpengaruh, termasuk faksi syuriah, makin kuat.

Kang Young Soon juga menulis, bahwa NU yang semula hanya bergerak di bidang keagamaan sebagaimana tujuan awal berdiri, cenderung berubah seiring gerak zaman. NU misalnya, pernah menjadi partai politik selama masa demokrasi liberal, Orde Lama, dan awal Orde Baru.

Perubahan politik seiring jatuhnya Soeharto juga disikapi dengan cepat oleh jama'ah NU. Sebagaimana ditulis Kang Young Soon, sehari setelah kemunduran Soeharto, pengurus Besar NU mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh daerah melalui kunjungan, telepon, faksimil, telegram, email dan sebagainya mengusulkan agar agar PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU yang datang dari berbagai lapisan di NU. Gus Dur sendiri mulanya tidak dapat menerima ide pembentukan partai dan tetap berpegang teguh pada Khittah. Reformasi juga berpengaruh luar biasa terhadap roda organisasi (*jam'iyyah*) NU.

Kang Young Soon menunjukkan bahwa seorang santri menghormati kiai

tidak hanya karena kekiayaannya saja, tetapi juga karena faktor keturunan. Unsur Gus Dur sebagai cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat Gus Dur menjadi begitu dihormati.

Gerak NU yang keluar masuk-politik, sebagaimana di tahun 1952, yang mendeklarasikan sebagai partai dan keluar dari Masyumi memperoleh suara yang signifikan karena NU berhasil memperoleh posisi ketiga. Di tahun 1973, NU juga menerima kebijakan pemerintah Orde Baru untuk berfusi dengan partai Islam lainnya dan membentuk wadah bernama PPP. Kesimpulan lain adalah, kekuatan tradisi pesantren NU sangat terbukti, ini terlihat pada Pemilu, khususnya dalam mobilisasi untuk tujuan politik. Dengan kata lain, pengaruh kultural NU terhadap jama'ahnya cenderung lebih kuat jika dibanding organisasi struktural NU.

Beberapa catatan ini, mungkin menjadi pelengkap dari gerak perubahan NU yang begitu cepat. Misalnya, kemenangan demi kemenangan yang diraih Gus Dur dulu, entah dalam konflik di inter-

nal NU sampai intervensi negara tampaknya tak begitu berhasil dalam Mukhtamar ke-31 di Solo. Di Mukhtamar yang tentu saja tidak menjadi bagian sejarah dari buku ini, menunjukkan bahwa tiga modal sebagaimana disampaikan Young Soon: ilmu, wawasan serta keturunan yang, ternyata kalah oleh "modal" yang lain di mukhtamar ke-31.

Sementara akhir-akhir ini, dalam situasi hiruk-pikuk politik, NU tak memainkan perannya dengan tangkas. Padahal, kecermatan NU dulu dalam menyiasati rezim Orde Baru yang tak memberi ruang bagi keberbedaan, tampak begitu cerdas misalnya dengan memilih kembali khittah 1926 dan mengkomodasi Pancasila sebagai asas tunggal. Tampaknya, kini NU telah menjelma menjadi yang lain. mungkin sekarang tak perlu siasat, karena NU kini tak di pinggiran lagi. []

**Ingwuri Handayani**  
*Alumnus Pondok Pesantren  
Futuhiyyah Mranggen dan aktif  
di Desantara Foundation*